



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal, selanjutnya disingkat dengan BHPDM dan BHRDM dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari.

8. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional, selanjutnya disingkat dengan BHPDP dan BHRDP dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.402.674.554.10 (Empat milyar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah

sepuluh sen).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari dihitung berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :
- Azas merata adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut BPPDM dan BHRDM; dan
 - Azas adil adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Nagari Proporsional.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP dalam Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah :

- Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
- Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan BHRDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \times \text{Nagari}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Nagari tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN dilaksanakan setiap akhir Semester.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN Semester II (dua), paling lambat bulan November tahun berjalan.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai APB Nagari
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat di bayarkan apabila realisasi Pajak Bumi Bangunan, di Nagari bersangkutan minimal mencapai 50% (lima puluh persen).

BAB V

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VI

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan APB Nagari.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan melalui camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikut.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4); dan
 - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah atau Tim Penyelesaian Masalah/Konflik Pemerintahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBB-P2 (70 %)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	13.213.100,00	2.477.500,00	17.407.200	33.097.800,00
2		MUARO SAKAI INDERAPURA	13.732.500,00	2.574.900,00	6.211.600	22.519.000,00
3		TIGA SEPAKAT INDERAPURA	12.028.300,00	2.255.400,00	4.444.100	18.727.800,00
4		INDERAPURA BARAT	11.427.200,00	2.142.600,00	2.269.900	15.839.700,00
5		KUDO-KUDO INDERAPURA	13.459.000,00	2.523.600,00	5.435.500	21.418.100,00
6		INDERAPURA SELATAN	12.480.800,00	2.340.200,00	6.413.200	21.234.200,00
7		SIMPANG LAMA INDERAPURA	12.305.500,00	2.307.300,00	10.154.300	24.767.100,00
8		TIGO SUNGAI INDERAPURA	11.725.400,00	2.198.600,00	9.263.600	23.187.600,00
9		TLUK AMPLU INDERAPURA	11.385.900,00	2.134.900,00	10.105.000	23.625.800,00
10		INDERAPURA TENGAH	13.319.800,00	2.497.500,00	3.706.800	19.524.100,00
11	PESISIR RANAH	PELANGAI	12.187.900,00	2.285.300,00	15.381.900	29.855.100,00
12		SUNGAI TUNU	13.089.600,00	2.454.300,00	13.237.000	28.780.900,00
13		SUNGAI TUNU UTARA	15.292.800,00	2.867.500,00	16.478.100	34.638.400,00
14		SUNGAI TUNU BARAT	13.342.800,00	2.501.800,00	20.047.000	35.891.600,00
15		NYIUR MELAMBAI PELANGAI	14.012.100,00	2.627.300,00	24.691.800	41.331.200,00
16		SUNGAI LIKU PELANGAI	15.830.900,00	2.968.400,00	15.949.300	34.748.600,00
17		KOTO VIII PELANGAI	14.584.200,00	2.734.600,00	19.758.600	37.077.400,00
18		PELANGAI GADANG	12.515.400,00	2.346.700,00	9.947.200	24.809.300,00
19		PELANGAI KACIAK	12.508.500,00	2.345.400,00	10.782.400	25.636.300,00
20		PASIA PELANGAI	13.840.700,00	2.595.200,00	19.853.500	36.289.400,00
21	ANG KAMBANG	KAMBANG	17.926.500,00	3.361.300,00	32.387.500	53.675.300,00
22		LAKITAN	14.518.900,00	2.722.400,00	16.410.600	33.651.900,00
23		KAMBANG UTARA	19.480.200,00	3.652.600,00	43.908.900	67.041.700,00

24	LENGAY	KAMBANG TIMUR	18.166.600,00	3.406.300,00	17.942.600	39.515.500,00
25		KAMBANG BARAT	17.852.300,00	3.347.400,00	33.743.100	54.942.800,00
26		LAKITAN UTARA	15.467.200,00	2.900.200,00	17.452.900	35.820.300,00
27		LAKITAN SELATAN	17.431.000,00	3.268.400,00	15.668.400	36.367.800,00
28		LAKITAN TIMUR	12.502.900,00	2.344.300,00	6.839.200	21.686.400,00
29		LAKITAN TENGAH	14.291.200,00	2.679.700,00	11.631.100	28.602.000,00
30	BATANG KAPAL	IV KOTO HILIE	18.368.300,00	3.444.100,00	23.914.100	45.726.500,00
31		IV KOTO MUDIEK	12.375.000,00	2.320.400,00	14.177.900	28.873.300,00
32		TALUAK	12.493.500,00	2.342.600,00	7.049.300	21.885.400,00
33		KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	16.921.200,00	3.172.800,00	12.830.800	32.924.800,00
34		KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	13.974.500,00	2.620.300,00	7.508.800	24.103.600,00
35		TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	13.906.700,00	2.607.600,00	4.152.500	20.666.800,00
36		TUIK IV KOTO MUDIEK	12.432.900,00	2.331.200,00	9.574.800	24.338.900,00
37		SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	13.528.400,00	2.536.600,00	9.305.900	25.370.900,00
38		TALUK TIGO SAKATO	12.130.000,00	2.274.400,00	9.488.100	23.892.500,00
39		IV JURAI	PAINAN	11.800.200,00	2.212.600,00	36.300.500
40	TAMBANG		12.600.900,00	2.362.700,00	3.498.600	18.462.200,00
41	SALIDO		15.490.000,00	2.904.400,00	27.331.000	45.725.400,00
42	LUMPO		11.316.000,00	2.121.800,00	3.230.700	16.668.500,00
43	BUNGA PASANG SALIDO		14.685.500,00	2.753.600,00	10.942.600	28.381.700,00
44	SAGO SALIDO		13.181.200,00	2.471.500,00	28.070.400	43.723.100,00
45	SALIDO SARI BULAN		12.990.000,00	2.435.700,00	3.294.700	18.720.400,00
46	KOTO RAWANG		12.364.400,00	2.318.400,00	2.567.200	17.250.000,00
47	LIMAU GADANG LUMPO		12.837.000,00	2.407.000,00	2.203.100	17.447.100,00
48	BATU KUNIK LUMPO		11.356.000,00	2.129.300,00	2.514.400	15.999.700,00
49	TARATAK TANGAH LUMPO		12.893.400,00	2.417.600,00	3.060.700	18.371.700,00
50	AMPUAN LUMPO		11.486.300,00	2.153.700,00	1.926.800	15.566.800,00
51	AMPANG TAREH LUMPO		11.717.400,00	2.197.100,00	3.868.200	17.782.700,00
52	BALAI SINAYAN LUMPO		11.424.200,00	2.142.100,00	2.591.000	16.157.300,00
53	SUNGAI GAYO LUMPO		11.040.200,00	2.070.100,00	2.522.200	15.632.500,00
54	SUNGAI SARIAK LUMPO		11.387.400,00	2.135.200,00	1.707.400	15.230.000,00
55	BUKIK KACIAK LUMPO		11.492.700,00	2.154.900,00	2.747.200	16.394.800,00
56	GUNUNG BUNGKUAK LUMPO		11.834.700,00	2.219.100,00	1.302.600	15.356.400,00
57	PAINAN SELATAN PAINAN	12.675.800,00	2.376.800,00	21.201.900	36.254.500,00	

58		PAINAN TIMUR PAINAN	13.188.100,00	2.472.800,00	19.769.900	35.430.800,00
59	BAYANG	KOTO BERAPAK	11.954.800,00	2.241.600,00	6.443.700	20.640.100,00
60		TALAOK	14.578.600,00	2.733.500,00	4.553.400	21.865.500,00
61		PASAR BARU	14.146.500,00	2.652.500,00	5.865.300	22.664.300,00
62		GURUN PANJANG	11.883.600,00	2.228.200,00	5.252.200	19.364.000,00
63		API-API PASAR BARU	12.591.300,00	2.360.900,00	3.720.900	18.673.100,00
64		TANJUNG DURIAN PASAR BARU	12.689.200,00	2.379.300,00	3.276.800	18.345.300,00
65		ASAM KAMBA PASAR BARU	13.512.600,00	2.533.700,00	4.217.200	20.263.500,00
66		SAWAH LAWEH PASAR BARU	13.745.300,00	2.577.300,00	6.869.000	23.191.600,00
67		KAPEH PANJI JAYA TALAOK	13.896.800,00	2.605.700,00	4.432.000	20.934.500,00
68		AUR BEGALUNG TALAOK	12.868.500,00	2.412.900,00	6.363.200	21.644.600,00
69		KAPELGAM KOTO BERAPAK	13.120.600,00	2.460.200,00	5.145.700	20.726.500,00
70		KOTO BARU KOTO BERAPAK	12.855.500,00	2.410.500,00	3.052.100	18.318.100,00
71		KUBANG KOTO BERAPAK	11.782.600,00	2.209.300,00	6.404.600	20.396.500,00
72		KAPUJAN KOTO BERAPAK	13.371.900,00	2.507.300,00	3.986.500	19.865.700,00
73		GURUN PANJANG UTARA	14.454.800,00	2.710.300,00	7.264.600	24.429.700,00
74	GURUN PANJANG BARAT	11.693.700,00	2.192.600,00	3.579.900	17.466.200,00	
75	GURUN PANJANG SELATAN	12.321.700,00	2.310.400,00	5.174.000	19.806.100,00	
76	OXI TARUSAN	SIGUNTUR	13.253.500,00	2.485.100,00	5.044.900	20.783.500,00
77		SUNGAI PINANG	13.966.900,00	2.618.800,00	2.277.200	18.862.900,00
78		DUKU	18.587.800,00	3.485.300,00	8.360.200	30.433.300,00
79		BATU HAMPA	13.815.900,00	2.590.500,00	5.424.300	21.830.700,00
80		NANGGALO	13.321.400,00	2.497.800,00	6.793.400	22.612.600,00
81		AMPANG PULAI	13.831.300,00	2.593.400,00	4.800.200	21.224.900,00
82		KAPUH	16.513.900,00	3.096.400,00	7.439.300	27.049.600,00
83		BARUNG-BARUNG BALANTAI	11.946.100,00	2.239.900,00	10.747.500	24.933.500,00
84		BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN	11.746.900,00	2.202.600,00	5.368.900	19.318.400,00
85		MANDEH	14.158.900,00	2.654.900,00	4.006.700	20.820.500,00
86		KAPUAH UTARA	12.823.400,00	2.404.400,00	2.861.700	18.089.500,00
87		TARATAK SUNGAI LUNDANG	14.562.200,00	2.730.500,00	1.908.700	19.201.400,00
88		SIGUNTUR TUA	11.489.900,00	2.154.400,00	1.333.200	14.977.500,00
89		KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	14.396.600,00	2.699.400,00	3.662.500	20.758.500,00
90		DUKU UTARA	12.950.000,00	2.428.200,00	7.113.900	22.492.100,00

91	K O T	PULAU KARAM AMPANG PULAI	13.254.000,00	2.485.200,00	3.318.200	19.057.400,00
92		JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI	13.346.700,00	2.502.600,00	3.677.900	19.527.200,00
93		CEROCOK ANAU AMPANG PULAI	11.529.000,00	2.161.700,00	4.336.500	18.027.200,00
94		SUNGAI NYALO MUDI AK AIA	12.379.700,00	2.321.200,00	11.119.000	25.819.900,00
95		BATU HAMPAR SELATAN	13.799.700,00	2.587.500,00	2.337.100	18.724.300,00
96		BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR	12.653.800,00	2.372.600,00	2.822.200	17.848.600,00
97		BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	11.833.300,00	2.218.800,00	4.198.000	18.250.100,00
98		SETARA NANGGALO	13.664.400,00	2.562.100,00	8.740.600	24.967.100,00
99		S U T E R A	TARATAK	13.684.600,00	2.565.900,00	6.411.100
100	SURANTIH		16.909.400,00	3.170.600,00	16.191.000	36.271.000,00
101	AMPING PARAK		19.944.900,00	3.739.800,00	34.348.100	58.032.800,00
102	AMPING PARAK TIMUR		15.120.000,00	2.835.100,00	20.038.600	37.993.700,00
103	KOTO TARATAK		12.029.200,00	2.255.500,00	6.441.200	20.725.900,00
104	LANSANO TARATAK		13.669.200,00	2.563.000,00	5.622.000	21.854.200,00
105	AUR DURI SURANTIH		16.436.000,00	3.081.800,00	11.181.700	30.699.500,00
106	RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH		15.794.800,00	2.961.600,00	7.402.400	26.158.800,00
107	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH		14.606.300,00	2.738.700,00	10.082.700	27.427.700,00
108	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH		13.534.800,00	2.537.800,00	6.477.500	22.550.100,00
109	GANTING MUDI AK SELATAN SURANTIH		12.871.700,00	2.413.500,00	8.275.600	23.560.800,00
110	GANTING MUDI AK UTARA SURANTIH	16.993.700,00	3.186.400,00	3.796.300	23.976.400,00	
111	S A R I B A G A N T I	PUNGGASAN	12.050.300,00	2.259.500,00	5.106.100	19.415.900,00
112		AIR HAJI	12.421.500,00	2.329.100,00	8.166.900	22.917.500,00
113		PUNGGASAN UTARA	14.563.300,00	2.730.700,00	12.813.600	30.107.600,00
114		PUNGGASAN TIMUR	13.746.200,00	2.577.500,00	8.761.500	25.085.200,00
115		PADANG XI PUNGGASAN	14.092.500,00	2.642.400,00	7.653.200	24.388.100,00
116		LAGAN MUDI K PUNGGASAN	11.604.400,00	2.175.900,00	5.195.600	18.975.900,00
117		LAGAN HILIR PUNGGASAN	12.537.400,00	2.350.800,00	9.644.600	24.532.800,00
118		AIR HAJI TENGGARA	15.520.000,00	2.910.100,00	6.927.700	25.357.800,00
119		PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	13.571.400,00	2.544.700,00	6.552.600	22.668.700,00
120		PASAR BUKIT AIR HAJI	13.366.200,00	2.506.200,00	6.044.900	21.917.300,00
121		AIR HAJI BARAT	12.829.000,00	2.405.500,00	4.894.600	20.129.100,00

122	LINGG	AIR HAJI TENGAH	14.196.800,00	2.662.000,00	6.472.200	23.331.000,00
123		RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	13.466.500,00	2.525.000,00	10.479.800	26.471.300,00
124		MUARA GADANG AIR HAJI	13.155.000,00	2.466.600,00	3.753.000	19.374.600,00
125		SUNGAI SIRAH AIR HAJI	12.423.400,00	2.329.400,00	4.208.400	18.961.200,00
126		MUARA KANDIS PUNGGASAN	12.278.200,00	2.302.200,00	2.660.100	17.240.500,00
127	LUNANG	LUNANG	13.940.300,00	2.613.900,00	8.696.600	25.250.800,00
128		LUNANG UTARA	12.596.100,00	2.361.800,00	2.505.600	17.463.500,00
129		LUNANG SELATAN	11.367.300,00	2.131.400,00	5.950.300	19.449.000,00
130		LUNANG BARAT	11.029.200,00	2.068.000,00	9.606.200	22.703.400,00
131		SINDANG LUNANG	11.157.500,00	2.092.100,00	15.341.200	28.590.800,00
132		PONDOK PARIAN LUNANG	10.864.500,00	2.037.100,00	3.981.200	16.882.800,00
133		LUNANG TENGAH	11.799.800,00	2.212.500,00	2.799.200	16.811.500,00
134		LUNANG SATU	11.214.600,00	2.102.800,00	7.298.600	20.616.000,00
135		LUNANG DUA	11.840.300,00	2.220.100,00	22.648.500	36.708.900,00
136		LUNANG TIGA	11.010.300,00	2.064.500,00	21.314.400	34.389.200,00
137	BASA AMPEK B ALAI TAPAN	TAPAN	11.963.100,00	2.243.100,00	1.736.700	15.942.900,00
138		PASAR TAPAN	10.482.100,00	1.965.400,00	5.003.900	17.451.400,00
139		BATANG ARAH TAPAN	12.099.100,00	2.268.600,00	3.143.700	17.511.400,00
140		AMPANG TULAK TAPAN	11.546.000,00	2.164.900,00	3.810.900	17.521.800,00
141		TANJUNG PONDOK TAPAN	12.280.300,00	2.302.600,00	4.186.400	18.769.300,00
142		BATANG BETUNG TAPAN	11.072.800,00	2.076.200,00	4.612.300	17.761.300,00
143		BUKIT BUAI TAPAN	11.128.700,00	2.086.700,00	3.181.000	16.396.400,00
144		RIAK DANAU TAPAN	12.347.600,00	2.315.200,00	4.744.900	19.407.700,00
145		KOTO ANAU TAPAN	11.436.900,00	2.144.500,00	1.938.700	15.520.100,00
146		DUSUN BARU TAPAN	11.290.600,00	2.117.000,00	1.809.800	15.217.400,00
147	AMPEK N AGARI B AYANG U TARA	PULUIK-PULUIK	14.875.600,00	2.789.200,00	3.685.400	21.350.200,00
148		KOTO RANAH	11.958.000,00	2.242.200,00	3.181.100	17.381.300,00
149		MUARO AIE	11.218.300,00	2.103.500,00	1.788.100	15.109.900,00
150		PANCUANG TABA	12.884.400,00	2.415.900,00	3.356.100	18.656.400,00
151		PULUIK-PULUIK SELATAN	13.378.900,00	2.508.600,00	4.891.700	20.779.200,00
152		LIMAU GADANG PANCUNG TABA	13.752.900,00	2.578.700,00	1.870.400	18.202.000,00
153	A	INDERAPURA UTARA	11.615.900,00	2.178.000,00	9.285.600	23.079.500,00
154		MUARA INDERAPURA	11.330.600,00	2.124.500,00	9.872.900	23.328.000,00
155		DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	11.445.700,00	2.146.100,00	8.976.600	22.568.400,00

156	AIRPUR	LALANG PANJANG INDERAPURA	10.867.900,00	2.037.800,00	13.008.400	25.914.100,00
157		PALOKAN INDERAPURA	12.368.500,00	2.319.100,00	13.146.700	27.834.300,00
158		LUBUK BETUNG INDERAPURA	11.845.600,00	2.221.100,00	3.993.900	18.060.600,00
159		TLUK KUALO INDERAPURA	12.659.800,00	2.373.800,00	4.556.400	19.590.000,00
160		TANAH BAKALI INDERAPURA	12.162.100,00	2.280.500,00	11.404.600	25.847.200,00
161		INDERAPURA TIMUR	12.651.700,00	2.372.200,00	7.312.900	22.336.800,00
162		PULAU RAJO INDERAPURA	11.810.000,00	2.214.400,00	3.085.100	17.109.500,00
163	RANAH AMPEK HULU TAPAN	SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	11.539.300,00	2.163.700,00	3.523.100	17.226.100,00
164		LIMAU PURUT TAPAN	11.783.800,00	2.209.500,00	3.829.100	17.822.400,00
165		TALANG BALARIK TAPAN	14.730.800,00	2.762.100,00	4.382.700	21.875.600,00
166		TEBING TINGGI TAPAN	12.515.500,00	2.346.700,00	4.019.100	18.881.300,00
167		BINJAI TAPAN	11.294.700,00	2.117.800,00	3.821.700	17.234.200,00
168		SUNGAI PINANG TAPAN	12.725.800,00	2.386.100,00	3.553.000	18.664.900,00
169		TALANG KOTO PULAI TAPAN	12.069.400,00	2.263.100,00	3.267.100	17.599.600,00
170		KAMPUNG TENGAH TAPAN	11.912.800,00	2.233.700,00	5.468.100	19.614.600,00
171		KUBU TAPAN	11.674.800,00	2.189.100,00	3.580.300	17.444.200,00
172		SIMPANG GUNUNG TAPAN	12.095.400,00	2.267.900,00	3.626.500	17.989.800,00
173	SILAUT	SILAUT	14.109.900,00	2.645.700,00	13.430.700	30.186.300,00
174		SUNGAI SIRAH	11.859.200,00	2.223.600,00	11.813.300	25.896.100,00
175		SUNGAI SARIK	11.421.400,00	2.141.600,00	12.674.800	26.237.800,00
176		SUNGAI PULAI	12.067.700,00	2.262.700,00	16.790.400	31.120.800,00
177		PASIR BINJAI	11.148.400,00	2.090.400,00	11.557.800	24.796.600,00
178		TALANG BINJAI	11.142.300,00	2.089.200,00	11.416.500	24.648.000,00
179		DURIAN SERIBU	11.419.200,00	2.141.200,00	22.751.400	36.311.800,00
180		LUBUK BUNTA	10.898.100,00	2.043.400,00	13.625.700	26.567.200,00
181		AIR HITAM	11.663.500,00	2.187.000,00	17.153.800	31.004.300,00
182		SAMBUNGO	11.532.897,40	2.162.833,10	6.396.525	20.092.255,10
		Total	2.377.418.997,40	445.776.133,10	1.579.479.424,60	4.402.674.555,10

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

